

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Human Right Watch dalam laporannya mencatat bahwa sejak jatuhnya Presiden Suharto pada Mei tahun 1998 huru-hara politik dan konflik horizontal makin kerap muncul di media. Sebut saja di bagian utara Sumatra, para pemberontak Aceh menuntut referendum sama halnya dengan Timor Timur pada kisaran 1999. Di Kalimantan, oknum Dayak dan Melayu membantai kaum Madura di pemukiman mereka pada tahun 1999-2003, sementara ribuan lebih orang tewas selama konflik sektarian di kepulauan Maluku pada kisaran 1999-2004. Kekerasan sektarian antara Kristen dan Muslim juga meletus di Poso, Sulawesi (Human Right Watch, 2013).

Selepas Suharto jatuh, pengaruh Islam konservatif kian meningkat. Kalangan Islamis, sebagaimana kelompok lain, memakai ruang demokrasi yang bebas dan luas untuk menyebarkan gagasannya. Kelompok Islamis populis dan bahkan militan berkembang secara mantab dalam menggalang kekuatan. Mereka termasuk Front Pembela Islam (FPI) yang dibentuk pada Agustus 1998, tiga bulan setelah Suharto lengser, dengan dukungan dari aparat keamanan yang saat itu bertujuan menantang kelompok mahasiswa dan aktivis yang memainkan peran kunci mendesak Suharto untuk mundur (Human Right Watch, 2013).

Sejak Presiden Yudhoyono menjabat mulai Desember 2004, terjadi peningkatan kekerasan dengan sasaran Ahmadiyah, Kristen, Syiah dan minoritas

agama lain. *Human Right Watch* mencatat lebih dari 430 gereja mendapat intimidasi dan diserang sejak 2004. Serangan terhadap kaum dan masjid-masjid Ahmadiyah kian meningkat sejak Presiden Yudhoyono menuruti tekanan kelompok-kelompok Islamis garis keras dan mengeluarkan surat keputusan bersama anti-Ahmadiyah pada Juni 2008. Sejak saat itu, sedikitnya 30 masjid Ahmadiyah disegel (*Human Right Watch*, 2013). Sedangkan menurut data yang dihimpun oleh Setara Institute di Jakarta, terdapat serangan 216 kasus serangan terhadap minoritas agama pada 2010, 244 kasus pada 2011, dan 264 kasus pada 2012 (*Setara Institute*, 2012). Wahid Institute, pemantau lain di Jakarta, mendokumentasikan 92 pelanggaran terhadap kebebasan agama dan 184 peristiwa intoleransi beragama pada 2011, naik dari 64 pelanggaran dan 134 peristiwa intoleransi pada 2010 (*Wahid Institute dalam Human Right Watch*, 2013)

Melihat data-data yang sudah dipaparkan, dalam satu dekade terakhir, terutama pasca reformasi, Indonesia menjadi salah satu kawasan di dunia yang paling aktif memproduksi cerita tentang konflik dan kekerasan atas nama agama. Media massa dan masyarakat sempat merekam beberapa kasus, kurang lebih variasinya sebagai berikut : (1) kekerasan yang berlangsung dalam ranah agama yang sama, seperti yang dialami oleh kaum Syiah di Madura, Jawa Timur dan kaum Ahmadiyah di berbagai tempat (*Human Right Watch*, 2013). (2) Kekerasan yang melibatkan agama yang berbeda, yang terepresentasi lewat konflik Poso dan Ambon yang berlangsung di tahun 1999 sampai 2004. Penutupan, pengerusakan dan intimidasi

yang dilakukan oleh kelompok atas nama agama tertentu (notabene mayoritas) terhadap sekolah dan tempat ibadah milik kaum minoritas juga menjadi dapat menjadi contoh (Human Right Watch, 2013). (3) Kekerasan satu kelompok atas nama agama, atas kelompok lain yang melakukan aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Hal ini sering dijumpai lewat aksi-aksi kaum militan dari agama tertentu seperti Front Pembela Islam (FPI) yang menyerang para aktivis dari Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Beragama (AKKBB) di pelataran Monas pada Juni 2008 (Human Right Watch, 2013). Kelompok FPI juga kerap melakukan ancaman dan tindakan “penertiban” terhadap lokasi tempat hiburan malam pada bulan Ramadhan, suatu tindakan yang lebih berhak dilakukan oleh pihak yang berwajib.

Penelitian ini tidak membahas secara mendetail tentang konflik dan kekerasan. Namun penelitian ini akan lebih banyak mengulas tentang salah satu upaya rekonsiliasi yang diharapkan dapat mencegah terjadinya variasi konflik dan kekerasan seperti yang telah dipaparkan di atas. Masyarakat luas mengenalnya dengan toleransi beragama atau toleransi antar umat beragama.

Meski akhir-akhir ini kasus konflik dan kekerasan lebih sering muncul ke permukaan, namun tindakan, kebiasaan dan sifat toleran diyakini masih ada dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sayangnya media massa konvensional kurang memberi ruang untuk publikasi semangat toleransi yang sebenarnya masih dapat ditemui di kalangan akar rumput. Saat seperti inilah media massa alternatif

diperlukan guna menghadirkan informasi, pengetahuan dan wacana alternatif bagi khalayak luas.

Seiring perkembangan teknologi dan pesatnya era digital, saat ini muncul beragam pilihan media massa alternatif. Salah satunya adalah film dokumenter. Tak dapat dipungkiri perkembangan seni film di Indonesia mempunyai sisi kemajuan yang sangat pesat dan hingga saat ini perfilman di Indonesia sudah mampu menunjukkan kekhasannya untuk menampilkan isu-isu yang lebih dekat dengan budaya dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Dapat dikatakan dunia perfilman saat ini telah mampu menyedot perhatian masyarakat. Selain itu film menjadi salah satu pemicu munculnya opini di antara banyaknya opini dalam ruang publik (Effendy, 2005: 10). Sebagai salah satu bentuk media massa, film juga punya efek atau pengaruh bagi pikiran, pendapat, sikap dan tindakan penonton meskipun efek tersebut cenderung lebih eksklusif ketimbang media massa konvensional. Oleh karena itu film adalah medium (*channel*) komunikasi yang ampuh, bukan saja untuk hiburan, tetapi juga untuk penerangan pendidikan (edukatif) secara penuh (Effendy, 2003: 207).

Film dokumenter sendiri berbeda dengan film fiksi atau drama. Film berjenis dokumenter selalu berusaha menyajikan realita melalui berbagai cara dan dibuat untuk berbagai macam tujuan. Namun tetap harus diakui, film dokumenter tak pernah lepas dari tujuan penyebaran informasi, pendidikan, dan propaganda bagi orang atau

kelompok tertentu (Effendy, 2005: 12) . Intinya film dokumenter tetap berpijak pada hal-hal yang sefaktual mungkin.

Kini dokumenter telah menjadi tren tersendiri di dunia perfilman. Para pembuat dokumenter pun banyak melakukan eksperimen sehingga muncul sajian dokumenter yang beragam, unik dan tak lazim. Salah satu film dokumenter yang unik yaitu film *Indonesia Bukan Negara Islam*. Film yang telah berkelana hingga Laos ini diisi oleh dua narator beragama Islam yang menuntut ilmu di sekolah Katolik selama bertahun-tahun. Menjadi menarik karena kedua narator tersebut adalah minoritas saat mereka berada di lingkungan sekolah namun saat menjejakkan kaki keluar dari gerbang sekolah, seketika itu pula mereka menjadi kaum mayoritas. Kedua narator tersebut lalu menceritakan kisah mereka di sekolah Katolik tadi. Mereka juga bertutur mengenai Islam dan Negara Islam itu sendiri. Film yang berdurasi 9 menit 33 detik ini juga memperlihatkan realita di negara ini dimana Indonesia seolah-olah “dikuasai” oleh satu arus utama sebuah agama (alphabetajournal.com, 2011). Penyerangan Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di Tugu Monas Jakarta 2008 silam adalah salah satu materi yang juga dibahas dalam film *Indonesia Bukan Negara Islam*. Judul film ini sendiri, terinspirasi oleh poster seorang demonstran yang tergeletak di pelataran Monas (Gambar Darurat, 2009). Film ini unik karena selain isu yang diangkat cukup sederhana, cara penyajian visualnya juga berbeda dengan film dokumenter pada umumnya. Film ini berisi potongan–potongan foto dalam *monochrome* yang disusun

dan diiringi pendapat-pendapat dari narasumber sehingga menjadi suatu cerita (*stop motion*).

Peneliti tertarik untuk meneliti film ini karena film ini menyuguhkan pernyataan tegas dan relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia hingga saat ini. Film ini menyodorkan konsep tentang toleransi antar umat beragama secara ringan dan sederhana. Di samping itu, film ini juga punya daya tarik di ranah gaya bercerita dan visualnya.

Banyak tanda yang bisa dikaji dalam film ini. Salah satunya adalah *frame* di mana ada dua orang siswa yang sedang melakukan ibadah sholat di dalam ruangan yang didalamnya juga terdapat patung salib Yesus dan Bunda Maria. Mungkin ini salah satu simbol dari nilai toleransi yang ingin ditampilkan oleh sang sutradara. Masih banyak simbol lain dalam film *Indonesia Bukan Negara Islam* terkait dengan nilai-nilai toleransi beragama yang menarik untuk dikaji. Oleh karena itu teknik analisa data yang akan digunakan adalah analisis semiotika. Semiotika dipilih karena kajian ini dinilai mampu memberi ruang bagi peneliti untuk membongkar pesan tersembunyi dalam film (Irawanto, 1999:vii). Penelitian ini menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce sebagai metode analisis. Semiotika ala Peirce diharapkan dapat membongkar makna yang terkandung dalam film *Indonesia Bukan Negara Islam* terlebih makna yang terkait dengan nilai-nilai toleransi beragama secara komprehensif sekaligus mendetail.

Pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce pernah dipakai oleh Nurlaelatul Fajriah dalam penelitiannya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 dengan judul Analisis Semiotik Film “CIN(T)A” Karya Sammaria Simanjuntak. Penelitian ini fokus membahas bagaimana cinta, agama dan perbedaan dalam film Cin(T)a ditinjau dari segitiga makna (*triangle meaning*) milik Charles Sanders Peirce termasuk mencari bagaimana makna yang dihadirkan lewat ikon, indeks dan symbol dalam film Cin(T)a tersebut. Meski memakai pendekatan dan teknik analisis yang sedikit banyak akan serupa namun penelitian Nurlaelatul akan berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan yang paling mencolok terletak pada obyek penelitiannya yakni pada jenis filmnya. Dalam penelitian ini, peneliti membahas film dokumenter pendek yang proses pembuatan dan penyajiannya tentu berbeda dengan film fiksi cerita seperti film Cin(T)a yang dibahas dalam penelitian milik Nurlaelatul. Dalam penelitian ini, peneliti juga membawa pokok bahasan yang lebih detail yakni representasi nilai-nilai toleransi beragama. Oleh karena itu peneliti akan lebih fokus membongkar tanda-tanda dalam film dokumenter *Indonesia Bukan Negara Islam* yang dapat diinterpretasikan sebagai gambaran toleransi beragama.

Film dokumenter sebagai obyek penelitian juga pernah dilakukan oleh Shinta Anggraini Budi Widianingrum dalam penelitiannya di Universitas Pembangunan Negara (UPN) Yogyakarta pada tahun 2012 dengan judul Rasisme dalam Film Fitna. Dalam penelitian tersebut, Shinta mengupas berbagai macam tanda yang dipakai oleh film Fitna sebagai sarana penggambaran rasisme berikut pesan dan makna yang

terkandung di dalamnya. Oleh karena itu dalam penelitiannya, Shinta menggunakan metode semiotik milik Roland Barthes yang melibatkan adanya sistem konotasi dan denotasi untuk mengurai hubungan antara signifier dan referent dalam film Fitna. Meski sama-sama meneliti film dokumenter, penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan yang berbeda dengan penelitian milik Shinta. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan semiotik versi Barthes melainkan dengan pendekatan Charles Sander Pierce. Semiotika Pierce dengan konsep ikon, indeks dan simbolnya diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih luas namun tetap detail dan aplikatif dengan tujuan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana nilai-nilai toleransi beragama direpresentasikan dalam film dokumenter “Indonesia Bukan Negara Islam” ?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui nilai-nilai toleransi beragama digambarkan dalam film dokumenter “Indonesia Bukan Negara Islam”.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, terutama yang berkaitan dengan komunikasi massa, serta sebagai tambahan referensi dan bahan pustaka khususnya bagi

penelitian selanjutnya yang berminat pada kajian film dan analisis dengan pendekatan semiotika.

2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana baru akan pentingnya sebuah analisa dan kritik bagi suatu karya film. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan motivasi bagi pembuat dokumenter muda agar mampu membuat film yang lebih berkualitas, berani dan mendidik.

E. Kerangka Konsep

E.1. Toleransi Beragama

Secara terminologi, istilah toleransi berasal dari bahasa latin *tolerare* yang berarti sabar (Irianti, 2012: 15). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka, toleransi memiliki kata dasar toleran yang berarti bersikap atau bersifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb). Sedangkan toleransi berarti sikap atau sifat toleran (KBBI, 1990 : 955). Sedangkan beragama berdasar pada kata agama yang menurut KBBI diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan (dewa,dsb) dengan ajaran kebaktian dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu dan beragama mempunyai makna menganut (memeluk) suatu agama (KBBI,1990 : 9) . Maka toleransi beragama dapat diartikan sebagai sikap saling menghargai yang dilakukan oleh sesama manusia pemeluk agama atau kepercayaan yang sama maupun berbeda.

Dalam pengkajian mengenai konsep toleransi secara teoritik menurut filsuf Amerika, Emerson (dlm Irianti, 2012: 11) menawarkan gagasan tentang “keyakinan subyektif (*self reliance*)”. Menurut Emerson keyakinan agama adalah sebuah pandangan dan komitmen eksistensial karena keyakinan agama pada dasarnya hanyalah konsepsi yang bersifat esensial (Irianti, 2012: 12). Dengan pemahaman seperti itu, masyarakat meyakini bahwa keyakinan dari masing-masing individu adalah hak yang hakiki. Sehingga pada nantinya pemahaman seperti ini akan berkembang menjadi suatu pola hidup yang saling memahami, menghormati dan menghargai keyakinan atau agama yang lain.

Islam, dalam kaitannya dengan toleransi mengenal istilah *silat-i'lrahm* yang berarti sikap saling member kasih-sayang atau saling cinta yang merupakan kewajiban setiap umat beragama (Rahman, 2002: 51) Biasanya istilah ini dipakai dalam hubungan keluarga maupun kelompok, tapi bisa juga diperluas dalam bingkai kemasyarakatan yang lebih luas. Dasar dari silaturahmi sendiri adalah persaudaraan, yang biasa digunakan dalam konteks persaudaraan sesama umat beriman kemudian dapat direntangkan kepada persaudaraan sesama manusia.

Ayat Al-Quran surah al-Hujurah (49:10-12) menggambarkan segi prinsipil dari teknis pelaksanaan persaudaraan ini. Ayat yang cukup panjang ini menggambarkan bahwa persaudaraan di antara manusia-manusia beriman secara teologis adalah idaman terbesar umat Islam. Namun menurut Al-Quran itu hanya bisa dicapai jika etika pergaulan antar manusia diwujudkan dengan tidak saling

memperolok, menertawakan, berprasangka, memata-matai, dan saling menggunjing (Rahman, 2002: 51) . Setidaknya ayat ini ingin menggambarkan bahwa seyogyanya orang beriman itu bersaudara satu sama lain.

Biasanya pandangan eksklusif memaknai kaum beriman hanya sebatas orang muslim saja dan tidak menganggap umat dari kepercayaan lain sebagai yang beriman. Namun pandangan yang lebih inklusif cenderung memberi maksud yang lebih luas tentang kaum beriman. Setiap orang yang yakin dan percaya akan keberadaan Tuhan sudah dapat dikatakan sebagai “orang yang beriman”. Oleh karena itu, kata “muslim” yang dipakai di sini pun, bisa dimaknakan dalam arti generiknya, yakni “orang-orang yang memasrahkan hidupnya kepada kehendak Allah,” tak peduli apa agama dan kepercayaannya (Rahman: 2002: 51).

Umar Hasyim dalam buku *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog Dan Kerukunan Umat Beragama* menuliskan ada beberapa unsur sebagai landasan terwujudnya tindakan toleransi, khususnya toleransi beragama (Hasyim dlm Irianti, 2012: 23-25):

1. Pengakuan akan hak masing-masing manusia sebagai dasar memahami perbedaan lintas budaya, agama, kepercayaan dan sosial kemasyarakatan
2. Lahirnya landasan rasa penghormatan dan penghargaan terhadap keyakinan maupun kepercayaan orang lain.

3. Konsep kemasyarakatan berbasis “*Agree In Disagreement*” (setuju dalam perbedaan). Hal ini menjadi indikator internalisasi budaya toleransi dalam masyarakat heterogen.
4. Kesadaran untuk saling mengerti dan memahami dalam aspek perbedaan (budaya, agama, kepercayaan, ras dan suku) sebagai pola memasyarakatkan budaya penghormatan terhadap perbedaan.
5. Penerimaan akan perbedaan yang ada, melalui konsep kejujuran dan kesantunan bersikap dalam memaksimalkan rasa penghormatan terhadap kelompok masyarakat lain.
6. Adanya jaminan aman, damai, rukun, dan tenteram sebagai landasan menjalankan nilai-nilai falsafah Pancasila.

E.2 Film dan Film Dokumenter

Lahirnya film sendiri tidak dapat lepas dari pengembangan kamera. W.K.L Dickson, asisten Thomas Alva Edison, yang menamainya dengan sebuah *kinetoscope*, meski Lumiere Bersaudara-lah yang pada akhirnya mempopulerkan perangkat tersebut dengan istilah lain : *cinematographe* (Bordwell & Thompson, 2004: 466). Saat itu film yang dibuat masih sangat sederhana, tidak lebih dari serangkaian gambar diam hasil dari fotografi yang berkedip-kedip sehingga menimbulkan ilusi gambar yang seolah bergerak. Di lain pihak, dunia kademik juga merespon perkembangan teknologi baru ini dengan membangun semacam kegiatan *film studies*. Para kritisi,

teoritisi, dan analisis film pada awalnya memandang film sebagai bentuk lain dari karya seni, yang menurut Budi Irawanto (1999 : 10), hanya dinilai sebagai kerangka indah dan buruk.

Sedangkan dokumenter adalah sebutan yang diberikan untuk film pertama karya Lumiere bersaudara yang berkisah tentang perjalanan (*travelogues*) yang dibuat sekitar tahun 1890-an. Tiga puluh enam tahun kemudian kata “dokumenter” kembali digunakan oleh pembuat dan kritikus film John Grierson untuk film *Moana* (1926) karya Robert Flaherty. Grierson berpendapat dokumenter merupakan cara kreatif merepresentasikan realitas (Hayward dlm Effendy, 2005 : 11). Meski ditentang oleh banyak pihak, pernyataan Grierson ini tetap dianggap relevan hingga saat ini.

Menurut data yang dihimpun oleh Heru Effendi dalam bukunya *Mari Membuat Film*, film dokumenter pertama di Indonesia dipelopori oleh Televisi Republik Indonesia (TVRI). Beragam film dokumenter tentang kebudayaan, flora dan fauna Indonesia telah banyak dihasilkan oleh TVRI. Memasuki era televisi swasta, film dokumenter tidak hanya dimonopoli oleh TVRI. Hampir semua televisi swasta punya program dokumenter, entah itu produksi sendiri ataupun membeli dari sejumlah *production house*. Salah satu gaya film dokumenter yang cukup tenar kala itu karena ditayangkan serentak di enam stasiun TV berbeda termasuk TVRI adalah *Anak Seribu Pulau* (Miles Productions, 1995). Selain untuk konsumsi televisi, film dokumenter juga sering diikuti dalam berbagai festival film dalam skala nasional

maupun internasional. Festival Film Indonesia pun telah memiliki kategori penjurian untuk jenis film dokumenter terhitung sejak tahun 1992 (Effendi, 2005: 12).

Daniel Chandler dalam *The Grammar of TV an Film* (aber.ac.uk, 2001) berpendapat bahwa film dan televisi menggunakan konvensi tertentu untuk menciptakan makna melalui gambar dan suara. Konvensi tersebut oleh Allan Rowe diistilahkan sebagai perangkat kode yang hadir dalam bentuk-bentuk sebagai berikut (Kusnoto, 2012:17) :

1. *Mise-en-scene*

Kode ini menunjuk pada kuasa sutradara untuk menuangkan visinya melalui komposisi dalam suatu *frame* atau *shot* dengan mempertimbangkan beberapa aspek berikut (Bordwell&Thompson, 2004: 179-200):

- Latar, kostum, properti, dan tata rias; berfungsi untuk menciptakan kesan realistik dari sebuah adegan.
- Tata cahaya; berfungsi untuk membangun *mood* dalam sebuah adegan
- Ekspresi dan pergerakan; aspek ini dilakukan oleh manusia, hewan bahkan benda-benda mati yang berfungsi sebagai ‘kendaraan’ bagi cerita dalam bentuk ekspresi wajah, perilaku, gesture tubuh, dan lain sebagainya.

2. *Cinematography*

Setiap film juga dibangun atas landasan sinematografi (*cinematography*) yang kuat. Sinematografi sendiri secara umum dapat dibedakan menjadi tiga aspek, yakni

type of shot, framing berdasarkan ketinggian kamera terhadap subyek serta framing berdasarkan pergerakan dan fokus lensa (Bordwell&Thompson, 2004:229).

Berikut adalah jenis-jenis framing yang terdapat dalam sinematografi, yakni jarak kamera terhadap obyek (*type of shot*), yaitu (aber.ac.uk, 2001):

a. *Extreme long shot*

Extreme long shot merupakan jarak kamera yang paling jauh dari obyeknya. Wujud fisik manusia nyaris tidak nampak. Teknik ini umumnya untuk menggambarkan sebuah obyek yang sangat jauh atau panorama yang luas.

b. *Long Shot*

Pada *long shot* tubuh fisik manusia telah Nampak jelas namun latar belakang (*background*) masih dominan. *Long shot* sering digunakan untuk *establishing shot*, yakni shot pembuka sebelum digunakan shot-shot yang lebih dekat.

c. *Medium long shot*

Pada jarak ini tubuh manusia terlihat dari bawah lutut sampa ke atas. Tubuh fisik manusia dan lingkungan sekitar relatif seimbang.

d. *Medium shot*

Pada jarak ini memperlihatkan tubuh manusia dari pinggang ke atas. Gestur serta ekspresi wajah mulai tampak. Sosok manusia mulai dominan dalam frame.

e. *Medium close-up*

Pada jarak ini memperlihatkan tubuh manusia dari dada ke atas. Sosok tubuh manusia mendominasi *frame* dari latar belakang tidak lagi dominan. Adegan percakapan normal biasanya memakai *medium close-up*.

f. *Close-up*

Umumnya memperlihatkan wajah, tangan, kaki, atau sebuah obyek kecil lainnya. Teknik ini mampu memperlihatkan ekspresi wajah dengan jelas serta gesture yang mendetail. *Close-up* biasanya digunakan untuk adegan dialog yang lebih intim. *Close-up* juga memperlihatkan detail sebuah benda atau obyek.

g. *Extreme close-up*

Pada jarak terdekat ini mampu menggambarkan lebih mendetail bagian dari wajah, seperti telinga, mata, hidung dan lainnya atau bagian dari sebuah obyek.

Framing berdasarkan ketinggian kamera terhadap subyek (aber.ac.uk, 2001) :

- a. *Low angle*, bertujuan untuk menggambarkan kegagahan dan wibawa subyek.
- b. *High angle*, bertujuan untuk menggambarkan subyek sebagai sosok yang lemah, kecil dan tak berdaya
- c. *Eye level*, bertujuan untuk menempatkan subyek pada kedudukan yang netral, seimbang dan sejajar dengan subyek lain dan penonton.

Framing berdasarkan pergerakan dan fokus lensa

Pengaturan fokus digunakan untuk mendapatkan *depth of field* yang sesuai sehingga gambar dapat menciptakan makna tertentu. Gambar dengan obyek yang

lebih terlihat fokus dibanding dengan latar belakangnya yang dikaburkan akan mengandung maksud berbeda dibanding dengan gambar yang mempunyai titik fokus rata di semua sisi gambar. Begitu pula dengan penggunaan lensa *zoom* yang bertujuan untuk memberi kesan bahwa kamera seolah-olah mendekati atau menjauhi subyek (Bordwell&Thompson, 2004: 237).

3. *Sound*

Kode ini hadir dalam bentuk alunan musik, narasi, dialog atau efek-efek suara tertentu. Musik biasanya berfungsi untuk membangun *mood* dan mengatur tempo adegan. Sedangkan dialog atau narasi juga mempunyai peran penting bagi sebuah film terutama guna melengkapi kejelasan makna dalam sebuah gambar adegan/ *frame* (Bordwell&Thompson, 2004: 347). Berhubungan dengan hal ini, Kris Budiman (2003: 76) juga pernah mengungkapkan bahwa : “*Di dalam film, misalnya, fungsi dialog bukanlah sekedar untuk menjelaskan adegan-adegan, melainkan terutama untuk mengembangkan tindakan dan, dengan demikian, plot melalui makna-makna yang tidak dapat ditemukan di dalam citra itu sendiri.*”

E.3 Film Dokumenter Sebagai Bentuk *Alternative Journalism*

Sampai saat ini masih terdapat perdebatan di kalangan para ahli bahwa apakah film dokumenter masuk dalam kategori karya jurnalistik atau tidak. Pernah ada anggapan bahwa film dokumenter bukanlah salah satu bentuk karya jurnalistik karena karakteristiknya yang terlalu subyektif. Namun dalam dekade terakhir ini

muncul suatu gejala baru dalam dunia jurnalisme yakni *alternative journalism* (jurnalisme alternatif). Publik mungkin masih ingat bagaimana *social media* seperti Twitter dan Facebook punya andil membantu masyarakat Mesir menyebarkan informasi kepada dunia mengenai kerusuhan besar-besaran di negeri tersebut, yang berakhir pada penggulingan presiden Hosni Mubarak. Bahkan media besar konvensional pun mengandalkan informasi dari sumber-sumber tersebut. Atton dan Hamilton kemudian menyebut aksi ini sebagai *alternative journalism* yaitu, “...*the media of protest groups, dissidents, fringe political organisations, even fans and hobbyists.*” (Atton & Hamilton, 2008: 1).

Pada dasarnya jurnalisme alternatif merupakan bentuk karya jurnalistik yang hadir untuk menandingi sajian materi di media konvensional. Jurnalisme alternatif hadir dengan gaya sajian yang berbeda dengan media konvensional. Dalam *alternative journalism*, tekanan modal untuk media tidak sebesar di media konvensional. Modal operasi bisa berasal dari siapa pun (kelompok, perseorangan atau bahkan lembaga) yang penting modal itu dipakai untuk mengembangkan *alternative journalism* semata-mata dalam perannya sebagai alat untuk perubahan sosial (Atton & Hamilton, 2008: 22-32). Oleh karena itu jurnalisme alternatif kerap dikaitkan sebagai sarana bagi terjalannya komunikasi sejajar antara satu kelompok tertentu dengan publik. Jurnalisme alternatif menyediakan jembatan bagi kaum yang selama ini dianggap tak punya suara, dan termarginalkan oleh jurnalisme konvensional. Mereka kini dapat menyuarakan partisipasinya dalam media dengan

cara dan ekspresi mereka sendiri. Oleh karena itu Medium yang dipakai dalam *alternative journalism*, bisa berupa apa pun, termasuk film dokumenter.

Lalu apa yang bisa dijadikan sebagai pembenaran bahwa film dokumenter merupakan salah satu bentuk representasi dari jurnalisme alternatif? John Grierson (pembuat film dokumenter pertama) berpendapat bahwa dokumenter merupakan perwujudan interpretasi kreatif tentang fakta (Hayward dlm Effendy, 2005: 13). Kemudian jika film dokumenter dilihat dari kaca mata jurnalistik sama seperti kegiatan menulis (artikel, feature, kolom, tajuk rencana), yakni proses kreatif penuangan ide-ide dan referensi dalam bentuk tulisan. Di dalamnya ada fakta serta menghindarkan dari hal yang bersifat artifisial. Sebuah film dokumenter selalu berdasarkan pada survei dan *mapping* (pemetaan) serta penggalian fakta di lapangan (Bordwell&Thompson, 2004: 129). Beda dengan film cerita yang identik dengan mengarang karena lebih fiktif dan imajinatif. Grierson sendiri pernah melakukan perlawanan terhadap pengaruh ekspresi romantisme Jerman yang pada saat itu sangat mendominasi perfilman Inggris. Dengan film dokumenter Grierson berupaya untuk mengembalikan unsur “*realist*” yang menjadi titik berat dalam sebuah film, bukan ‘romantik’ dan imajinatifnya.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan ciri khas jurnalisme alternatif yang dikemukakan oleh Atton dan Hamilton, film dokumenter dapat dikatakan sebagai media yang selalu meninjau kembali unsur obyektivitas (*objectivity revisited*). Meninjau kembali obyektivitas disini dimaksudkan sebagai sebuah antitesis terhadap

prinsip yang selama ini diusung oleh media konvensional yakni penyajian fakta yang bebas nilai. Dalam konteks film dokumenter, para pembuat dokumenter malah selalu cenderung bersikap subyektif dan sudah menyatakan keberpihakannya terhadap obyek tertentu sejak awal. Sesuai dengan prinsip di dalam jurnalisme alternatif, keberpihakan sang pembuat film muncul karena sempitnya ruang bagi kelompok tertentu untuk berbicara di media mainstream konvensional yang sarat akan berbagai kepentingan. Hal inilah yang memungkinkan film dokumenter untuk memberi lebih banyak ruang terhadap orang-orang biasa sebagai narasumber. Seperti kaum buruh, aktivis atau bahkan warga biasa. Jurnalis alternatif dalam hal ini adalah sang pembuat dokumenter selalu berusaha menekankan sisi humanis liputan di samping juga mengumpulkan fakta-fakta yang bersifat objektif. Di sinilah sang pembuat dokumenter menyatakan loyalitasnya kepada pihak yang sedang dibela.

Campur tangan pemodal, politik dan kepentingan lainnya membuat media *mainstream* dan konvensional kerap melakukan seleksi terhadap narasumber yang dipilih. Biasanya yang terpilih adalah mereka yang elit, punya “nama” dan punya “power”. Di dalam jurnalisme alternatif justru terjadi yang sebaliknya. Media alternatif seperti film dokumenter memungkinkan siapa pun bisa jadi narasumber, tak perlu adanya seleksi yang terlampau ketat.

Jika di media *mainstream*, orang biasa kebanyakan hanya dipakai sebagai materi pendukung atau hanya terbatas dalam berita yang bernilai *human interest* saja. Hal ini berbeda dengan media alternatif. Justru pendapat dan keterangan dari orang-

orang biasa lah yang kerap dijadikan sumber informasi utama. Orang-orang biasa ini dipancing untuk menjadi analis bagi kasus mereka sendiri. Mereka juga berhak untuk menyatakan solusi yang terbaik bagi permasalahan tertentu menurut pandangan mereka. Oleh karena itu seorang pembuat dokumenter musti berupaya untuk membangun situasi yang akrab dengan orang-orang biasa tersebut. Orang-orang biasa di sini maksudnya adalah kaum *grassroot* yang minim daya dan kuasa namun punya informasi yang penting bagi keutuhan *director statement* dalam sebuah karya dokumenter.

F. Kajian Teori

F.1 Teori Representasi

Menurut buku *Studying Culture :A practical Introduction* (Giles & Middleton, 1999:32) , representasi didefinisikan dalam tiga definisi yakni:

1. *to stand in for* seperti adanya logo suatu produk atau perusahaan tertentu dalam bentuk publikasi suatu *event*, maka logo tersebut menunjukkan keberadaan produk atau perusahaan bersangkutan dalam *event* tersebut.
2. *to speak or act on behalf of* seperti seorang Presiden atau kepala negara yang berbicara dan mengambil keputusan atas nama negara.
3. *to re-present* seperti beragam tulisan biografi seseorang yang berusaha menghadirkan kembali fakta-fakta mengenai tokoh tertentu di masa lampau.

Namun dalam kenyataanya ketiga definisi tersebut saling membaaur dan tumpah tindih satu sama lain. Oleh karena itu Hall dalam bukunya yang berjudul

Representation: Cultural Representation and Signifying Practices ingin menegaskan definisi representasi dalam konteks budaya dalam masyarakat bahwa “*Representation connects meaning and language to culture... Representation is an essential part of the process by which meaning is produced and exchange between members of culture*”(Hall, 2003: 17). Intinya Hall ingin mengatakan bahwa representasi adalah salah satu cara guna memproduksi makna. Representasi hadir sebagai bentuk konkrit yang mewakili suatu konsep yang cenderung abstrak. Bentuknya dapat berupa kata, gambar, sekuen, cerita, sesuatu yang mewakili ide, emosi dan sebagainya.

Marcel Danesi mendefinisikan representasi sebagai proses perekaman gagasan, pengetahuan, atau pesan secara fisik. Lebih tepatnya dijelaskan sebagai penggunaan “tanda-tanda” untuk menampilkan ulang sesuatu yang telah diindra, diserap, dirasakan dan dimaknai oleh seseorang atau kelompok tertentu dalam bentuk fisik (Danesi, 2010:3). Dalam semiotika dinyatakan bahwa bentuk fisik sebuah representasi, yaitu X pada umumnya disebut sebagai “penanda”. Makna yang dimunculkan yaitu Y, pada umumnya dikenal sebagai petanda dan makna secara potensial yang dapat diambil dari representasi ini ($X=Y$) dalam sebuah kelompok masyarakat dengan budaya tertentu, disebut sebagai signifikasi atau sistem penandaan.

Representasi sangat bergantung pada tanda dan citra yang sudah ada dan melekat secara kultural dalam masyarakat. Menurut Hall ada dua tahap dalam proses representasi yakni pertama, representasi mental, yaitu konsep tentang “sesuatu” yang

ada di kepala setiap masing-masing manusia, representasi dalam hal ini masih berupa sesuatu yang abstrak. Kedua yakni “bahasa” yang berperan dalam proses pengkonstruksian makna. Konsep yang semula abstrak harus diterjemahkan dalam “bahasa” yang lebih lazim supaya dapat terjalin hubungan antara konsep atau ide tentang sesuatu dengan tanda dari simbol-simbol tertentu.

Teori representasi cenderung memakai pendekatan konstruksionis, yang berargumen bahwa makna dikonstruksi melalui bahasa. Stuart Hall dalam artikelnya mengatakan bahwa, *“things don`t mean: we construct meaning, using representational system-concepts and sign.”* (Hall, 2003: 25). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa suatu konsep (abstrak) dan tanda (dalam bahasa) menjadi bagian penting yang digunakan dalam proses kontruksi atau produksi makna.

Jadi dapat ditarik benang merah bahwa representasi merupakan suatu proses untuk memproduksi makna dari konsep yang ada di pikiran manusia melalui medium bahasa. Proses produksi makna tersebut dimungkinkan dengan hadirnya representasi. Namun, tingkat keberhasilan proses pemaknaan tersebut juga sangat bergantung pada latar belakang pengetahuan dan pemahaman suatu kelompok masyarakat terhadap suatu tanda. Suatu kelompok masyarakat harus memiliki refrensi dan pengalamn yang sama untuk memaknai sesutau dengan cara yang medekati sama. Jadi representasi bukanlah hal yang statis tapi merupakan proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan pengetahuan dan kebutuhan para pengguna tanda yang juga terus bergerak dan berubah.

Media sebagai tempat berkumpulnya berbagai macam teks tentu akan banyak menampilkan bentuk-bentuk representasi. Representasi dalam media menunjukkan bagaimana gagasan, pendapat dan ideologi seseorang atau kelompok tertentu ditampilkan dalam bentuk informasi atau yang lebih dikenal sebagai berita. Dalam representasi media, tanda yang akan digunakan untuk melakukan representasi tentang sesuatu mengalami proses seleksi. Mana yang sesuai dengan kepentingan, ideologi dan pencapaian tujuan komunikasi yang diusung oleh media tersebut sementara tanda-tanda yang lain diabaikan.

F.2 Tanda dan Semiotika

Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari bahasa Yunani *semeion* yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang telah terbangun sebelumnya dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Tanda terdapat dimana-mana: kata adalah tanda, demikian pula gerak isyarat, lampu lalu lintas, bendera dan sebagainya. Struktur karya sastra, struktur film atau bangunan dapat dianggap sebagai tanda. Ahli filsafat dari Amerika, Charles Sanders Peirce, menegaskan bahwa manusia hanya dapat berpikir dengan sarana tanda. Maka dapat dipastikan bahwa tanpa tanda manusia tidak dapat berkomunikasi satu sama lain.

Bagi Peirce, makna suatu tanda adalah mengemukakan sesuatu yang sering ia sebut sebagai *representamen* (*refrent*). Apa yang kemudian dikemukakan oleh tanda, apa yang diacunya, yang ditunjuknya disebut oleh Peirce sebagai *object*. Jadi suatu

tanda mengacu pada suatu acuan dan representasi adalah fungsi yang utama (Zoest, 1991: 7) . “Sesuatu” yang digunakan oleh Pierce agar tanda dapat berfungsi disebut sebagai *ground* yang kerap ditemukan dalam bentuk kode. Selain itu, tanda juga diinterpretasikan. Hal ini berarti bahwa setelah dihubungkan dengan acuan, dari tanda yang orisinal berkembang suatu tanda baru yang disebut *interpretant*. Jadi pada intinya, tanda merupakan hubungan triadik antara *ground*, acuan dan dengan *interpretant*-nya. Oleh karena itu, bagi Pierce tanda tidak hanya bersifat representatif melainkan juga interpretatif.

Pierce kemudian membedakan hubungan antar tanda dengan acuannya ke dalam tiga jenis hubungan, yaitu:

1. Ikon, jika ia berupa hubungan kemiripan. Ikon dapat berupa foto, peta geografis, penyebutan atau penempatan.
2. Indeks, jika ia berhubungan dengan kedekatan eksistensi. Misalnya asap tebal membumbung menandai kebakaran, wajah ceria menandakan kegembiraan dan sebagainya.
3. Simbol, jika ia berupa hubungan yang sudah terbentuk secara konvensi (Zoest, 1991:9).

Sebagai benang merah, paling tidak Pierce juga pernah mengemukakan teori segitiga makna atau yang kerap dikenal dengan *triangle meaning* yang terdiri dari tanda (sign), object dan interpretant. Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang

dapat ditangkap oleh panca indera dan merupakan sesuatu yang merujuk (merepresentasikan) hal lain di luar tanda itu sendiri. Tanda itu sendiri terpecah menjadi tiga yakni simbol (tanda yang muncul dari kesepakatan), ikon (tanda yang muncul dari perwakilan fisik) dan indeks (tanda yang muncul akibat hubungan sebab akibat). Sedangkan acuan tanda ini disebut *object*. *Object* atau acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk oleh tanda. Sedangkan *Interpretant* atau pengguna tanda ialah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu. Bagi Pierce hal terpenting dalam proses semiosis adalah bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu dipakai manusia saat mereka berkomunikasi.

Selain Pierce, Saussure, pemikir linguistik dari Eropa juga punya pemahaman tersendiri mengenai tanda. Saussure mengatakan bahwa tanda selalu mempunyai tiga wajah yakni tanda itu sendiri (*sign*), aspek material (entah berupa suara, huruf, bentuk, gambar, gerak) dari tanda yang berfungsi menandakan atau yang dihasilkan oleh aspek material (*signifier*), dan aspek mental atau konseptual yang dirujuk oleh aspek material (*signified*) (Sunardi, 2004: 41). Dengan kata lain Saussure menyebut *signifier* sebagai bentuk bunyi atau coretan bermakna, sedangkan *signified* adalah gambaran mental atau konsep sesuatu dari *signifier*. Hubungan antara keberadaan fisik tanda dan konsep mental tersebut dinamakan *signification*. Intinya *signification* adalah upaya dalam memberi makna terhadap dunia (Sobur, 2004;125).

Namun perlu ditambahkan bahwa *sign* berbeda dengan *signification* dalam arti bahwa *sign* merupakan kesatuan antara *signifier* dan *signified*, sedangkan *signification* merupakan hubungan antara *signifier* dan *signified*. Maka hadirilah semiotika sebagai upaya mencari berbagai hubungan yang menyatukan antara *signifieds* dan *signifiers* dari berbagai unsur objek.

Secara terminologis, semiotika dapat diidentifikasi sebagai ilmu yang mempelajari sedertan objek, peristiwa dan juga kebudayaan sebagai tanda. Pada dasarnya analisis semiotika merupakan suatu kajian untuk merasakan sesuatu yang dipertanyakan lebih lanjut ketika kita membaca, melihat, menonton suatu teks.

G. Metodologi Penelitian

G.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan menggunakan analisis semiotik untuk mengolah data-datanya. Dalam penerapannya, pendekatan kualitatif menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis yang bersifat nonkuantitatif, seperti penggunaan instrumen wawancara mendalam dan pengamatan (Birowo, 2004:2). Selain itu sebagai penelitian semiotika, penelitian ini lebih mengandalkan interpretasi peneliti untuk memahami fenomena sosial terlebih pada tindakan-tindakan sosial (Widianingrum, 2012:33). Oleh karena itu penelitian ini cenderung bersifat subyektif dimana sang peneliti dapat mengeksplorasi dan menginterpretasi makna pada obyek penelitian secara bebas.

G.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini ialah film *Indonesia Bukan Negara Islam*. Film ini berdurasi 9 menit 32 detik dan distribusikan secara independen oleh Gambar Darurat Picture melalui saluran internet *YouTube* dan festival film atau pemutaran khusus di berbagai tempat. Film yang diproduksi pada tahun 2011 ini sempat membuat kontroversial di kalangan penontonnya karena isi filmnya yang menyudutkan satu kalangan tertentu. Jason Iskandar, sang sutradara yang saat itu masih duduk di bangku SMA di Jakarta mampu membuat film dengan *statement* yang sederhana namun “berani”. Film ini menampilkan bagaimana pendapat-pendapat beberapa siswa SMA yang beragama Islam merasakan situasi bersekolah di sekolah Katolik. Selain itu sang sutradara juga meminta pendapat dari beberapa siswa tadi mengenai tindakan anarkis yang kali itu diduga dipelopori oleh Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Para narasumber dalam film dokumenter ini juga diminta pendapatnya mengenai rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi yang kala itu sedang menjadi *headline* di media massa.

Dari film ini nantinya akan digali unit analisis yang berupa potongan-potongan gambar (frame) yang terdapat dalam film *Indonesia Bukan Negara Islam*, juga dari teks dialog yang ada dalam film yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

G.3 Jenis Data

- Data Primer

Data yang diperoleh dari proses mengamati obyek penelitian secara langsung (Sudarso, 2004: 55), dalam hal ini adalah film Indonesia Bukan Negara Islam. Dari film ini akan diambil beberapa potongan gambarnya (frame) yang diperlukan dan berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Selain itu peneliti akan wawancara secara langsung dengan sutradara film *Indonesia Bukan Negara Islam* guna memperkaya data tentang obyek penelitian dalam penelitian ini.

- Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi pustaka sebagai referensi baik itu berupa buku, majalah, jurnal, artikel, esai dan lain sebagainya (Sudarso, 2004:55-56). Data yang diambil dari sumber sekunder diatas akan banyak membantu peneliti dalam menyusun deskripsi obyek penelitian. Data sekunder juga akan digunakan sebagai data pendukung dalam proses interpretasi dan analisis obyek penelitian.

G.4 Teknik Mengumpulkan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut ;

a) Observasi

Dalam konteks ilmu komunikasi, penelitian dengan metode observasi biasanya dilakukan untuk melacak secara sistematis dan langsung gejala-gejala komunikasi terkait dengan persoalan-persoalan sosial, politik dan kultural masyarakat tertentu (Pawito, 2007: 111). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan pengamatan terhadap obyek penelitian dengan cara menonton dan mengamati secara

teliti adegan demi adegan serta dialog-dialog dalam film *Indonesia Bukan Negara Islam* kemudian mencatat, memilih potongan gambar (frame) sesuai dengan konsep nilai toleransi beragama dan menganalisisnya sesuai dengan kerangka teori dan model penelitian yang digunakan yakni teori semiotika.

b) Dokumentasi

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data sekunder mengenai obyek penelitian yang didapat dari sumber tertulis, seperti arsip, dokumen resmi, tulisan-tulisan yang terdapat di situs internet dan sejenisnya yang dapat mendukung kerja analisa dalam sebuah penelitian (Widianingrum, 2012: 21). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan laporan tertulis dari berbagai lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat, artikel, review film dan opini yang berkaitan dengan film *Indonesia Bukan Negara Islam* sebagai data pendukung dalam proses interpretasi dan analisis data.

c) Wawancara (interview)

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang melibatkan manusia sebagai narasumber sehubungan dengan realitas atau gejala yang dipilih untuk diteliti (Pawito, 2007: 132). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung secara tatap muka dengan sutradara film *Indonesia Bukan Negara Islam*, Jason Iskandar. Wawancara ini dilakukan guna mendapatkan informasi sekaya mungkin tentang obyek penelitian yakni film dokumenter *Indonesia Bukan Negara Islam*.

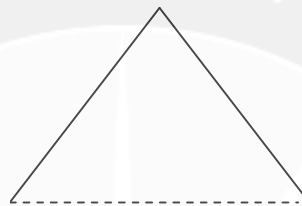
G.5 Teknik Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian diklarifikasikan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah ditentukan. Teknik analisa yang akan digunakan untuk menganalisis data-data ini yakni analisis semiotik. Semiotika dipilih karena kajian ini dinilai mampu member ruang bagi sang peneliti untuk membongkar “pesan tersembunyi” dalam film (Irawanto, 1999:vii). Langkah awal analisis sebuah film adalah dengan membagi film berdasarkan sekuen-sekuen. Dalam penelitian ini, proses analisis dilakukan sesuai dengan langkah-langkah berikut :

1. *Sequence/ scene breakdown* : yakni dengan mengamati secara teliti kemudian mengidentifikasi adegan-adegan (dalam *frame*) yang berkaitan dengan topik penelitian yakni konsep toleransi beragama yang telah dipaparkan dalam kerangka konsep.
2. Signifikansi semiotika : mencari makna atau maksud yang berkaitan dengan konsep toleransi beragama di balik tanda-tanda yang muncul dalam adegan-adegan yang telah dipilih sebelumnya.

Analisa *frame*/adegan dilakukan dengan bantuan teori segitiga makna atau *triangle meaning* milik Pierce yang terdiri dari tiga elemen utama, yakni tanda (sign/representamen), object, dan interpretant (Budiman, 2004: 26).

Gambar 1.



Sumber: Kris Budiman, *Semiotika Visual* (2011)

Proses pemaknaan tanda pada Pierce mengikuti hubungan yang berproses antara tiga titik, yaitu tanda/representamen, objek dan interpretan. Representamen adalah bagian tanda yang dapat dipersepsi indera yang merujuk pada suatu yang diwakili olehnya yang disebut dengan objek. Prinsip dasarnya ialah bahwa tanda bersifat representatif, yaitu tanda adalah “sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain”. Kemudian interpretan adalah interpretasi yang lebih luas dari proses penafsiran hubungan antara representamen dengan obyek. Oleh karena itu, bagi Pierce tanda tidak hanya representatif namun juga interpretatif.

Dalam proses interpretasi, Pierce membedakan tiga jenis tanda yang mungkin ada. (1) Hubungan antara tanda dan acuannya dapat berupa hubungan kemiripan; tanda itu disebut **ikon**. (2) Hubungan ini dapat timbul karena ada kedekatan eksistensi; tanda itu disebut **indeks**. (3) akhirnya hubungan itu dapat pula merupakan

hubungan yang sudah terbentuk secara konvensional; tanda itu adalah **simbol** (Zoest, 1992: 8-9). Sedangkan acuan bagi tanda ini disebut obyek. Obyek merupakan konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk oleh tanda. Interpretasi atau pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang obyek yang dirujuk oleh sebuah tanda. Hal yang terpenting dalam proses *signifikasi* adalah bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda tersebut digunakan dalam proses berkomunikasi. Dalam proses pemaknaan ini, peneliti akan banyak menggali data dan informasi dari berbagai referensi yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, ensiklopedia, laporan, artikel dalam majalah maupun situs resmi di internet. Cara ini dilakukan untuk menjaga unsure obyektifitas penelitian sebagai salah satu bentuk karya ilmiah.

Penelitian secara sengaja memilih pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce karena teori Peirce merupakan *grand theory* dalam semiotika. Gagasannya bersifat komprehensif sekaligus mendetail. Peirce mengidentifikasi partikel dasar dari tanda dan kemudian menggabungkan kembali semua komponen dalam struktur tunggal (Sobur, 2006 : 97). Semiotika Peirce dengan konsep ikon, indeks dan simbolnya diharapkan mampu memberikan perspektif yang luas sekaligus detail dan aplikatif dengan obyek penelitian ini yakni film.